

Dampak Kasus Penembakan Warga dalam Tragedi Seruyan

Bagus Prasetyo Santoso,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, baguspra0708@gmail.com

Gaung Agung Rachmatullah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, gaungagung11@gamil.com

Abstract

The tragedy of shooting people in Seruyan, Central Kalimantan, has had a significant impact. This tragic incident has raised fear and worry among the community, as well as causing deep psychological trauma. Apart from that, this tragedy has also sparked public anger and protests against gun violence and the protection of civilians. The social impact was also felt, with the emergence of divisions and tensions between residents. It is hoped that the local government can immediately take concrete steps to reconcile the community and ensure their security. Economically, this tragedy also has serious impacts. Economic activity in the area was disrupted, both in terms of trade and tourism. Investment and local economic development may also be hampered by the uncertainty and tensions created by this tragic incident. Thus, the tragedy of shooting residents in Seruyan has a multidimensional impact that requires a comprehensive response from various parties.

keywords: Seruyan Tragedy, Resident Shooting, Multidimensional Impact.

Abstrak

Tragedi penembakan warga di Seruyan, Kalimantan Tengah, telah menimbulkan dampak yang signifikan. Kejadian tragis ini telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Selain itu, tragedi ini juga telah memicu kemarahan dan protes publik terhadap kekerasan senjata api dan perlindungan terhadap warga sipil. Dampak sosialnya juga terasa, dengan munculnya perpecahan dan ketegangan antarwarga. Pemerintah setempat diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mendamaikan masyarakat dan memastikan keamanan mereka. Secara ekonomi, tragedi ini juga berdampak serius. Aktivitas ekonomi di daerah tersebut terganggu, baik dari segi perdagangan maupun pariwisata. Investasi dan pengembangan ekonomi lokal juga dapat terhambat akibat ketidakpastian dan ketegangan yang muncul akibat insiden tragis ini. Dengan demikian, tragedi penembakan warga di Seruyan memiliki dampak multidimensional yang memerlukan respons komprehensif dari berbagai pihak.

kata kunci: Tragedi Seruyan, Penembakan Warga, Dampak Multidimensional.

Pendahuluan

Pada tanggal 7 Oktober 2023, terjadi tragedi penembakan warga di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tragedi ini terjadi akibat konflik antara warga dengan aparat kepolisian dan perusahaan perkebunan sawit PT Hampan Masawit Bangun Persada (HMBP). Konflik ini bermula dari tuntutan warga yang menuntut 20 persen wilayah plasma dan hak atas tanah dari perusahaan sejak 16 September 2023. Warga juga menuntut perusahaan untuk menyerahkan lahan sawit seluas dua hektare kepada mereka. Namun, perusahaan tidak memenuhi tuntutan tersebut sehingga warga melakukan aksi menutup jalan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023.

Pada saat aksi menutup jalan tersebut, aparat kepolisian menerjunkan pasukan Brimob untuk membubarkan aksi tersebut. Bentrokan antara warga dan aparat kepolisian terjadi dan pada saat itu terdengar suara tembakan. Akibat dari bentrok tersebut seorang

warga bernama Gijik meninggal dunia karena tertembak di dada dan satu warga lainnya mengalami luka berat. Selain itu, sebanyak tiga warga di Kotawaringin Timur juga diduga tertembak oleh aparat kepolisian. Salah satu dari tiga warga tersebut meninggal di lokasi dan satu orang kritis, sedangkan satu orang lainnya masih belum diketahui kondisi terbarunya karena dilarikan ke rumah sakit.

Tragedi ini menimbulkan beberapa dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan:

1. Dampak terhadap kehidupan masyarakat: Tragedi ini menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Seruyan khususnya dan menjadi perhatian masyarakat pada umumnya.
2. Dampak terhadap keberlanjutan: Aktivitas ekonomi di daerah tersebut terganggu, baik dari segi perdagangan maupun pariwisata. Investasi dan pengembangan ekonomi lokal juga dapat terhambat akibat ketidakpastian dan ketegangan yang muncul akibat insiden tragis ini. Hal menyebabkan pendapat daerah menurun.
3. Dampak terhadap hak asasi manusia: Tindakan represif rakyat dalam konflik seruyan tersebut diduga melanggar hak asasi manusia, termasuk hak pergakan, hak kelangsungan, hak pengendalian diri, hak kehormatan, hak mengemukakan pendapat dimuka umum dan hak kehidupan.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mendamaikan masyarakat dan memastikan keamanan mereka, serta memahami sebab-sebab kematian dan kemarahan ini. Perlu di soroti pentingnya peran pemerintah dalam memperhatikan grievance masyarakat dan menghentikan penyalahatan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyelamatkan dan memperbaiki kebijakan yang menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan terhadap masyarakat. Dampak sosial kasus penembakan ini juga terasa, dengan munculnya perpecahan dan ketegangan antarwarga. Masyarakat harus berkesadaran dan berkoordinasi untuk mengatasi perbedaan dan menyediakan solusi yang bermanfaat. Walhi menyoroti pentingnya masyarakat menghadapi ketidakpastian dan ketegangan bersama, serta berkoordinasi untuk mencari solusi yang bermanfaat.

Dalam beberapa kasus, kematian akibat kecelakaan kepolisian juga menjadi sorotan penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan keberadaan dan keselamatan dari kepolisian dalam menangani kasus-kasus penembakan ini. Walhi menyoroti pentingnya kepolisian menyelamatkan dan memperbaiki kebijakan yang menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan terhadap Masyarakat. Secara keseluruhan, kasus penembakan warga di Seruyan menunjukkan pentingnya masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian dan ketegangan, serta bersama menemukan solusi yang bermanfaat untuk mengatasi konflik dan menjaga kehidupan dan keamanan masyarakat.

Identitas korban yang terlibat dalam tragedi ini adalah Gijik yang meninggal dunia karena tertembak di dada dan satu warga lainnya mengalami luka berat. Selain itu, sebanyak tiga warga di Kotawaringin Timur juga diduga tertembak oleh kepolisian. Salah satu dari tiga

warga tersebut meninggal di lokasi dan satu orang kritis, sedangkan satu orang lainnya masih belum diketahui kondisi terbarunya karena dilarikan ke rumah sakit.

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian yang diambil dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif.

Pembahasan

Kasus ini bermula pada saat datangnya PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Desa Bangkal, Seruyan pada tahun 2007. Kedatangan PT ini disambut baik oleh masyarakat Desa Bangkal, Seruyan walaupun ada sebagian warga yang kontra terhadap munculnya PT tersebut. Ambisi dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada sangat kokoh untuk terus melancarkan keinginan dan targetnya.

Seiring berjalannya waktu PT tersebut mensiasati masyarakat yang kontra terhadap kedatangannya dengan cara memberikan iming-iming dan janji manisnya yang tentunya melalui pemerintah dan parahnya lagi pemerintah tersebut adalah Bupati Seruyan sendiri yang bernama Darwan Ali, sehingga sedikit banyaknya masyarakat mulai tertarik dan menjadi Pro terhadap kedatangan PT tersebut.

Dengan memperoleh simpatik dan kepercayaan dari masyarakat, PT Hamparan Masawit Bangun Persada mulai melakukan pengerjaan penggundulan hutan dan menyewa rumah warga Desa Bangkal untuk dijadikan kantor sementara mereka. PT HMBP ini sering kali berinteraksi dengan warga sekitar dan anehnya PT tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi terkait apa saja yang akan mereka lakukan kedepannya seolah olah PT HMBP ini sengaja tidak menunjukkan ketransparansiannya yang memang seharusnya hal itu dilakukan demi keberlangsungan masyarakat Desa Bangkal.

Masyarakat merasakan adanya kejanggalan yang dilakukan oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada karena tidak adanya transparansi dan keterbukaan terhadap masyarakat, hal tersebutlah menjadikan masyarakat bertanya tanya terhadap apa yaang sebenarnya PT HMBP ini lakukan.

Masyarakat menuntut untuk diadakannya suatu perjanjian tertulis yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2013. Masyarakat berharap dengan diadakannya perjanjian tertulis ini dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Bangkal Seruyan dan terulangnya kesalahan keslahan yang sudah terjadi dimasa lampau.

Perjanjian yang dilakukan antara PT. HMBP dengan masyarakat Desa Bangkal itu terdapat tiga poin. Poin yang *pertama*, perusahaan berjanji akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur desa, dari menyediakan air bersih hingga jaringan dan aliran listrik ke rumah warga, membangun sekolah dan memberikan beasiswa pendidikan, pembuatan tambak ikan. Poin pertama ini juga mengatur bahwa PT. HMBP akan menyelesaikan perseoalan lahan masyarakat yang berada di dalam batas hak guna usaha mereka.

Pada poin yang *kedua*, PT HMBP berjanji akan membangun kebun plasma untuk warga Desa Bangkal. Setiap kepala keluarga dinyatakan akan mendapat dua hektar kebun. Dalam poin kedua ini didapati pernyataan bahwa PT. HMBP akan merealisasikan penyediaan kebun plasma itu paling lama awal Januari 2014. Tiga orang dari pihak PT. HMBP menandatangani surat perjanjian tertulis itu. Ketiganya adalah pejabat dari PT. Best Agro International, induk PT. HMBP. Nama ketiganya adalah Wahyu Bima Dharta, Aris Siahaan, dan Arief Nasution. Kepala Polsek dan Koramil Danau Sembuluh era itu turun menandatangani surat perjanjian tertulis, sebagai pihak yang turut menyaksikan resolusi konflik tersebut. Adapun, warga Desa Bangkal diwakili tiga orang. James Watt bertanda tangan sebagai koordinator lapangan masyarakat Bangkal. Dua lainnya adalah Saptono dan Sibin. Tak lupa pula Bapak Darwan Ali selaku Bupati saat itu ikut serta dalam penandatanganan surat perjanjian tertulis itu.

Akan tetapi harapan masyarakat tidak terwujud, justru PT HMBP tersebut terus melakukan hal hal yang seharusnya tidak dilakukan seperti mengabaikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tiga poin dalam surat perjanjian tertulis yang sudah ditandatangani. Lebih dari satu dekade usai penandatanganan surat perjanjian tertulis itu, janji penyediaan kebun plasma sebagai medium pendongkrak kesejahteraan warga tidak kunjung terlaksana. Setelah belasan tahun kehadiran perusahaan, cukup sudah kesabaran masyarakat. Sejauh ini PT. HMBP belum memberikan keterangan resmi terhadap keluhan warga setempat.

Alhasil masyarakat Desa Bangkal Seruyan sepakat untuk melakukan kebebasan berpendapat yaitu dengan cara unjuk rasa atau demo yang ditujukan pada PT Hamaparan Masawit Bangun Persada, dengan tujuan untuk memberikan hak hak yang seharusnya masyarakat Desa bangkal Seruyan dapatkan.

Unjuk rasa dilakuan demi rasa keadilan, unjuk rasa berlangsung selama 23 hari yang tuntutanannya adalah kebun plasma dari perusahaan. Tuntutan masyarakat Desa Bangkal tidak diindahkan, muncul masalah baru dengan adanya tindak kekerasan dari pihak kepolisian yang berupa tindakan penembakan terhadap anggota yang tengah unjuk rasa yang menuntut keadilan yang menyebabkan korban meninggal Dunia dan luka luka. Terdapat 4 korban, yang pertama bernama Gijik meninggal dunia, yang lainnya hanya mengalami luka.

Konroversi yang Muncul Terkait Tragedi Seruyan

Peristiwa tanggal 7 Oktober tahun 2023 tepatnya 2 bulan silam di Desa Bangkal merupakan puncak dari kekerasan aparat yang menghadang warga Desa Bangkal sejak September 2023. Aksi protes masyarakat sendiri sudah berlangsung sejak 16/09/2023 hingga akhirnya “terpaksa” berakhir pada 7/10/2023 akibat jatuhnya korban jiwa. Protes ini merupakan bentuk transmisi keinginan dan tuntutan PT Hamaparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP).), yang tidak menepati janji dan melaksanakan kesepakatan Desa Bangkal yang telah disepakati sebelumnya dengan masyarakat sejak tahun 2006, saat perusahaan tersebut pertama kali beroperasi di Desa Bangkal. Akibatnya, petugas dikerahkan secara berlebihan untuk “membubarkan” protes masyarakat Desa Bangkal terhadap PT Hamaparan Masawit Bangun Persada.

Informasi yang dihimpun, sedikitnya 440 aparat dari Satuan Brimob, Intelijen dan Keamanan, Aparatur Sipil Negara, dan Reserse Kriminal, antara lain, telah dikirim ke Desa Bangkal. Penegakan hukum ini bisa dari Polda Kalteng, Polres Kotawaringin Timur, dan Polres Seruyan. Penempatan aparat yang berlebihan berujung pada represi terhadap warga Desa Bangkal, tim juga menemukan bahwa dalam beberapa kesempatan polisi menembakkan gas air mata dan peluru secara sembarangan ke arah warga sehingga melukai warga serta puluhan ibu dan anak. mengalami trauma. Penggunaan senjata sembarangan ini berujung pada terjadinya penembakan pada 7 Oktober yang mengakibatkan satu warga tewas dan satu warga lainnya mengalami luka tembak serius.

Kasus ini merupakan bentuk pembunuhan yang tidak sah atau tidak sah. Hasil tersebut juga menunjukkan adanya warga yang menjadi korban penangkapan, penahanan dan penyiksaan, serta penculikan dan penggeledahan sewenang-wenang. Selain itu, sekitar 40 kendaraan bermotor milik warga dirusak dan disita polisi, serta beberapa warga melaporkan kehilangan harta benda di dalam kendaraannya. Akhirnya, dari berbagai pengamatan tersebut terungkap bahwa cukup banyak kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Desa Bangkal. Kesempatan ini mendorong berbagai pihak seperti Mabes Polri, Polda Kalteng, Komnas HAM, LPSK dan Kompolnas mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi.

Secara khusus, masyarakat dan organisasi masyarakat Desa Bangkal Seruyan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia memulai penyelidikan dengan membentuk tim pencari fakta (TPF). Oleh karena itu, hal ini mendesak untuk segera dilakukan, karena pihak kepolisian dalam hal ini Polda Kalteng, Polres Kotawaringin Timur, dan Polres Seruyan melalui penyidikan menunjukkan tidak serius dalam mengungkap fakta kasus tersebut. secara profesional. Sikap polisi seolah-olah berada pada posisi pembela dan pembela perusahaan. Hal ini sudah jelas pihak kepolisian membela siapa yang mempunyai kekuasaan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, pihak kepolisian sangat biadab dan kejam terhadap masyarakat biasa tanpa melihat aspek filosofis instansi kepolisian dibuat.

Upaya Penyelidikan dan Tindakan yang Diambil oleh Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang menyelidiki kasus bentrok yang terjadi dalam demonstrasi di wilayah PT Hampan Masawit Bangun Persada (PT HMBP) di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pasalnya, dalam demonstrasi itu disebut menyebabkan tiga orang terkena tembakan polisi, dua orang di antaranya mengalami luka berat dan satu orang meringang nyawa.

Komnas HAM menyesalkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan luka berat itu. Komnas HAM meminta Polda Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan serta seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif supaya mendorong semua pihak untuk tidak melakukan tindakan kekerasan serta mengutamakan dialog untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

Ketua Komnas HAM mengatakan kasus tersebut masih dalam proses pemantauan. Peninjauan langsung lokasi kejadian masih dalam proses diskusi di internal. Belum ada

rencana spesifik [datang langsung ke lokasi]. Tapi kasus ini masih dalam proses penanganan Komnas HAM.

Komnas HAM telah melakukan upaya penyelidikan dan tindakan terkait kasus penembakan warga dalam tragedi Seruyan. Komnas HAM telah meminta keterangan dari 7 orang saksi, untuk mengetahui kronologi terjadinya peristiwa penembakan yang menewaskan Gijik dan melukai dua orang lainnya yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian di PT HMBP. Selain menginterogasi 7 orang saksi, Komnas HAM juga meminta keterangan kepada para pendamping dan kuasa hukum warga Desa Bangkal. Komnas HAM juga telah mengidentifikasi sejumlah fakta terkait insiden penembakan yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Komnas HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Namun, upaya Komnas HAM dalam kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada tindakan lanjutan yang diambil.

Hingga saat ini, belum terdapat informasi spesifik mengenai hasil penyelidikan Komnas HAM tentang kasus penembakan warga di Seruyan. Namun, berdasarkan laporan, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terkait dugaan kekerasan aparat yang merenggut nyawa warga di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah. Selain itu, sebuah tim advokasi telah menyerahkan hasil investigasi awal penembakan warga Seruyan ke kantor Komnas HAM. Meskipun demikian, informasi terperinci mengenai hasil penyelidikan tersebut belum dipublikasikan.

Komnas HAM sempat mengalami beberapa masalah dalam penyelidikan kasus penembakan warga di Seruyan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya kerjasama dari pihak kepolisian dalam memberikan informasi dan data terkait kasus tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memahami secara menyeluruh mengenai peristiwa penembakan tersebut. Komnas HAM juga meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian atau pihak-pihak lain yang melakukan kekerasan mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia, dan luka berat.

Tragedi berdarah yang terjadi 2 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 07-16 Oktober 2023 telah membawa luka yang mendalam bagi masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Seruyan dan khususnya keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa yang awalnya dipicu oleh demo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Seruyan itu telah menyebabkan korban jiwa melayang. Yang tersisa hanyalah kepedihan dan jerit tangis keluarga yang ditinggalkan. Aparat keamanan TNI dan Polri tidak mampu berbuat banyak menghadapi kebringasan masyarakat saat ini dikarenakan ketidak netralan institusi tersebut. Meskipun saya pribadi tidak menyaksikan langsung, kerana sedang tugas belajar. Namun dengan mengikuti peristiwa melalui tayangan TV yang disiarkan, sebagai anak bangsa sungguh merasa sangat prihatin dan sangat menyayangkan atas kejadian tersebut.

Dampak Terjadinya Tragedi Seruyan bagi Masyarakat Luas

Kasus penembakan warga di Seruyan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat luas. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Masyarakat merasa khawatir dan takut terhadap keamanan mereka sendiri, serta mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat peristiwa penembakan tersebut;
2. Aktivitas ekonomi di daerah tersebut terganggu, baik dari segi perdagangan maupun pariwisata. Investasi dan pengembangan ekonomi lokal juga dapat terhambat akibat ketidakpastian dan ketegangan yang muncul akibat insiden tragis ini;
3. Terjadi perpecahan dan ketegangan antarwarga, serta munculnya perbedaan pendapat dan pandangan terkait kasus tersebut;
4. Masyarakat adat di Seruyan menghadapi ketidakpastian dan kekhawatiran hak asasi manusia dalam menghadapi kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat negara di luar proses hukum;
5. Keluarga korban dan masyarakat luas merasa kecewa dan tidak puas dengan penanganan kasus penembakan tersebut, serta meragukan proses hukum yang sedang berlangsung.
6. Mobilisasi Masyarakat untuk perubahan tragedi ini juga dapat memicu mobilisasi masyarakat untuk mencari perubahan dan keadilan. Protes dan tuntutan lebih lanjut terhadap kebijakan perusahaan dan tindakan aparat kepolisian mungkin muncul sebagai respons dari masyarakat yang ingin melindungi hak-hak mereka.

Pasca kasus penembakan, diperlukan langkah-langkah nyata untuk merestorasi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya rekonsiliasi, transparansi, dan reformasi kebijakan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Dari dampak-dampak tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus penembakan warga di Seruyan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat luas, baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah tindakan yang tepat dan efektif dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi dampak-dampak tersebut dan memastikan bahwa kasus ini dapat ditangani secara adil dan transparan.

Kaitan dengan Konvenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik

Berdasarkan kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah terdapat beberapa hak yang dilanggar oleh PT Hampan Masawit Bangun Persada (HMBP) yaitu diantaranya :

Yang *pertama* adalah Pasal 6 angka (1) yang menyatakan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Yang *kedua* adalah Pasal 7 yang menyatakan “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

Yang *ketiga* adalah Pasal 9 angka (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Dari pasal yang sudah dijelaskan diatas, sudah jelas bahwa kasus tragedi Seruyan melanggar pasal yang terdapat dalam Konvenan Inernasional Hak Hak Sipil Dan Politik diantaranya Pasal 6 Angka (1) tentang hak untuk hidup, Pasal 7 tentang penyiksaan, dan Pasal 9 angka (1) tentang kebebasan dan keamanan pribadi.

Penutup

Kasus penembakan warga dalam tragedi Seruyan menyoroti beragam dampak yang muncul, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian, dan ketidakpastian serta ketegangan di masyarakat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari dan keberlanjutan ekonomi lokal. Dampak pertama adalah terkait kehidupan masyarakat yang terpapar ketakutan dan trauma psikologis akibat insiden penembakan. Hal ini menciptakan perpecahan dan ketegangan di antara warga, mengancam rasa aman dan kesejahteraan mental mereka. Dampak ini memerlukan perhatian khusus dalam pemulihan sosial dan dukungan psikologis bagi korban dan keluarga mereka.

Dampak ekonomi mencakup gangguan aktivitas perdagangan dan pariwisata di wilayah tersebut, menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakpastian investasi. Ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk memulihkan stabilitas ekonomi lokal dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor. Selain itu, kasus ini menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian, yang melibatkan tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian ini, memastikan pertanggungjawaban yang adil, dan menerapkan perubahan kebijakan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Tragedi penembakan di Seruyan menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan respons komprehensif dari pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah mendamaikan, mendukung korban, dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan dan pencegahan.